

## Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi I

Fadyla Nur Aprilia<sup>1\*</sup>, Ahlun Ansar<sup>2</sup>, Putri Ekayanti<sup>3</sup>, Wahid Ramadhan<sup>4</sup>, Arismunandar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Jl. Tamalate No.14, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222, Indonesia

E-mail: [fadylanuraprilia2324@gmail.com](mailto:fadylanuraprilia2324@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3675>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 16 Nov 2025

Revised: 22 Nov 2025

Accepted: 28 Nov 2025

#### Kata Kunci:

Inklusi, Implementasi, Sekolah Dasar, Kebijakan, Disabilitas.

#### Keywords:

*Inclusion, Implementation, Elementary, Policy, Disability.*



### ABSTRACT

Pendidikan inklusif merupakan upaya pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, namun penerapannya di sekolah dasar masih terkendala oleh keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi I, meliputi aspek kebijakan sekolah, pelaksanaan pembelajaran, peran guru dan orang tua, serta tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif dengan baik melalui penerapan prinsip kesetaraan, kurikulum yang dimodifikasi, serta kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Sekolah juga telah menyediakan beberapa fasilitas pendukung seperti ramp dan alat bantu belajar sederhana, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan sarana fisik. Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan siswa dan efektivitas pembelajaran. Kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi I menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ramah dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.

*Inclusive education represents an effort to provide equal learning opportunities for all children, including those with special needs; however, its implementation at the elementary school level still faces various challenges such as limited facilities, insufficient teaching staff, and a lack of environmental support. This study aims to describe the implementation of inclusive education at UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi I, covering aspects of school policy, learning implementation, the roles of teachers and parents, as well as the challenges encountered. Using a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation, the findings indicate that the school has implemented inclusive education policies effectively through the application of equality principles, a modified curriculum, and collaboration among teachers, the principal, and parents. The school has also provided several supporting facilities such as ramps and simple learning aids, although there remain limitations in human resources and physical infrastructure. Regular evaluations are carried out to assess student progress and learning effectiveness. In conclusion, the implementation of inclusive education at SD Negeri Unggulan Mongisidi I reflects a strong commitment to creating a fair, inclusive, and friendly learning environment for all students.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Fadyla Nur Aprilia, et al (2025). Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi I, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3675>

### PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

konteks global yang menuntut kesetaraan, akses, dan keadilan sosial, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan belajar yang bermutu tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah reguler. Pendidikan inklusif menekankan penghargaan terhadap keberagaman, kesetaraan, serta layanan yang fleksibel agar kebutuhan setiap peserta didik dapat terpenuhi (Jannah & Suriansyah, 2025).

Secara global, pendidikan inklusif mulai mendapatkan perhatian serius sejak dideklarasikannya Salamanca Statement pada tahun 1994 yang menegaskan bahwa sekolah harus mampu mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun latar belakang lainnya. Sejalan dengan komitmen internasional tersebut, Indonesia memperkuat implementasi pendidikan inklusif melalui berbagai regulasi nasional, salah satunya adalah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa (Arif et al., 2025). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap sekolah, khususnya sekolah dasar, harus memberikan layanan yang ramah, adaptif, dan nondiskriminatif terhadap seluruh peserta didik.

Namun demikian, Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan pada aspek kebijakan internal sekolah, kesiapan guru, pengembangan kurikulum diferensiasi, serta ketersediaan fasilitas fisik yang mendukung (Irmawati et al., 2024). Selain itu, banyak sekolah yang belum memahami konsep inklusif secara menyeluruh, sehingga penerapannya cenderung bersifat administratif dan belum menjadi transformasi nyata dalam praktik pembelajaran (Munajah et al., 2021). Pada jenjang sekolah dasar, tantangan ini menjadi semakin penting karena di sinilah pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan dasar dimulai. ABK seharusnya tidak dipisahkan dari lingkungan belajar reguler, melainkan harus berinteraksi, bekerja sama, dan berkembang dalam ekosistem pendidikan yang menghargai keberagaman (Zahirah & Maharani, 2025).

Selain persoalan kurikulum, kompetensi guru juga menjadi isu krusial karena banyak guru belum memiliki keterampilan pedagogik dan pemahaman psikologis yang memadai untuk menangani ABK secara efektif, serta membutuhkan pelatihan khusus untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (Arifin et al., 2023). Fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, ruang sumber, dan sarana mobilitas juga masih sangat terbatas, sehingga menghambat proses pembelajaran yang optimal. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan anak, padahal kolaborasi antarpihak merupakan prasyarat penting dalam pendidikan inklusif yang efektif (Mujiati & Yoenanto, 2023).

Dari sisi penerimaan peserta didik baru (PPDB), Sejumlah sekolah masih ragu menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) karena merasa belum memiliki kesiapan fasilitas maupun tenaga pendidik untuk layanan inklusif, meskipun prinsip inklusivitas menegaskan bahwa setiap anak berhak bersekolah di tempat terdekat tanpa diskriminasi. Al-Nur, (2023) menekankan bahwa PPDB pada sekolah inklusi seharusnya dilakukan secara terbuka dan disertai asesmen awal agar kebutuhan calon siswa dapat teridentifikasi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik di lapangan, sehingga perlu perhatian lebih pada implementasi PPDB di sekolah dasar negeri inklusif.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan inklusif dari berbagai perspektif seperti implementasi pembelajaran diferensiasi, program guru pendamping khusus, kesiapan sekolah, dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada sekolah luar biasa, sekolah berbasis agama, atau sekolah reguler non-unggulan. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri unggulan di wilayah perkotaan. Sekolah unggulan memiliki karakteristik unik, seperti tuntutan prestasi tinggi dan ekspektasi akademik besar, tetapi diwajibkan memberi layanan yang adil kepada peserta didik yang beragam (Zahirah & Maharani, 2025)

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena secara khusus menyoroti implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar, sebuah sekolah dasar negeri unggulan yang memiliki karakteristik unik, yaitu tidak hanya menuntut pencapaian akademik tinggi

tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjadi sekolah ramah inklusi. Selain itu, penelitian ini mengkaji aspek kebijakan sekolah, PPDB, kurikulum pembelajaran, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, peran orang tua, evaluasi, serta tantangan implementasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai operasionalisasi pendidikan inklusif di konteks sekolah unggulan di wilayah perkotaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami implementasi pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan nasional. Pendidikan inklusif yang berhasil pada jenjang sekolah dasar akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya (Zahirah & Maharani, 2025). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah, pengambil kebijakan, serta pihak sekolah dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar melalui kajian mendalam terhadap delapan aspek utama penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu kebijakan sekolah, PPDB, kurikulum, mobilisasi dan fasilitas ABK, sumber daya manusia, peran orang tua dan masyarakat, evaluasi, serta tantangan yang dihadapi.

## **METODE**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi I Makassar pada bulan September 2025, dengan melibatkan wawancara bersama kepala sekolah dan salah satu guru kelas sebagai narasumber utama. Pemilihan sekolah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan program pendidikan inklusif secara konsisten dan menunjukkan komitmen tinggi dalam menyediakan layanan pendidikan yang ramah bagi semua peserta didik. Selain wawancara, dilakukan pula pengamatan langsung terhadap lingkungan sekolah, sarana dan prasarana pendukung, serta proses pembelajaran di kelas inklusif untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran dan manajemen sekolah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung seperti profil sekolah, laporan kegiatan, dokumentasi sarana prasarana, serta regulasi terkait pendidikan inklusif, di antaranya Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam proses pengumpulan data digunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan dan fasilitas sekolah, serta interaksi pembelajaran di kelas inklusif. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan kepala sekolah dan guru kelas guna menggali informasi terkait kebijakan, strategi pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui bukti tertulis, foto, dan dokumen resmi sekolah.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi dan wawancara diseleksi dan difokuskan pada aspek penting seperti strategi pembelajaran, peran guru pendamping, serta dukungan fasilitas. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan dokumentasi pendukung. Tahap terakhir adalah verifikasi, yaitu menelaah kembali keakuratan dan konsistensi data untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk implementasi, tantangan, dan upaya sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif di UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi I telah berjalan dengan baik dan mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pihak sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang terbuka bagi semua peserta didik. Sekolah tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari kebijakan formal, tetapi juga mengupayakan penyesuaian di berbagai aspek seperti kebijakan sekolah, metode pembelajaran, dan sarana pendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar memperlihatkan suasana yang harmonis

antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus, di mana guru berperan aktif dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai inklusivitas telah terinternalisasi dalam praktik pendidikan di sekolah dasar tersebut, baik melalui kebijakan kepala sekolah, peran guru, maupun dukungan orang tua dan masyarakat sekitar.

#### ***Kebijakan Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip pendidikan inklusif. Sekolah ini menjadi salah satu lembaga pendidikan dasar yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara terbuka dan berkesinambungan. Kepala sekolah beserta seluruh warga sekolah memiliki kesadaran bahwa pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Kebijakan inklusif di sekolah ini tampak dari penerimaan peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, mental, sosial, maupun intelektual. Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam upaya agar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tidak ter-diskriminasi dari anak-anak normal lainnya, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Prinsip equity dijadikan dasar dalam setiap keputusan, baik dalam penerimaan peserta didik maupun pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Guru dan tenaga kependidikan dilibatkan secara aktif dalam pelatihan serta sosialisasi tentang pendidikan inklusif agar nilai-nilai keberagaman dan empati tertanam dalam budaya sekolah.

Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah menerapkan sistem yang terbuka dan fleksibel. Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tetap difasilitasi untuk mendaftar dan mengikuti proses asesmen awal. Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari guru kelas, guru bimbingan konseling, dan guru pembimbing khusus (GPK) untuk memetakan karakteristik anak, potensi, serta hambatan belajarnya. Hasil asesmen kemudian dijadikan dasar untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dan dukungan yang dibutuhkan selama proses belajar.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa sekolah mengimplementasikan paradigma child-centered yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Apabila terdapat anak dengan kebutuhan yang sangat spesifik (seperti tuna netra total atau tuna daksa berat), pihak sekolah akan berkoordinasi dengan sekolah luar biasa (SLB) agar penanganannya lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan Arriani et al. (2021) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan dampak positif untuk semua peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dengan pendidikan inklusi, peserta didik difabel diuntungkan dengan lingkungan belajar yang luas, mempunyai kesempatan berinteraksi sosial dengan siswa yang normal, dan siswa yang normal mampu belajar bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi budaya yang melekat dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformasional yang memastikan seluruh elemen sekolah bekerja selaras dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan setara bagi semua siswa

#### ***Kurikulum, Pembelajaran, dan Sumber Daya Manusia***

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar dilaksanakan melalui penerapan Kurikulum Merdeka yang diadaptasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), guru dan GPK menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) atau Individualized Education Program (IEP) yang menyesuaikan tujuan, isi, metode, serta sistem penilaian dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Model pendidikan di SD Negeri Unggulan Mongisidi I menjadi model penerapan inklusi yang berhasil karena terdapat modifikasi kurikulum, kerja sama antara guru kelas dan GPK yang ada, serta adanya dukungan dari orang tua maupun masyarakat sekitar (Putri & Mus, 2021).

Proses pembelajaran mengedepankan pendekatan Universal Design for Learning (UDL), yang menekankan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam kegiatan belajar. Guru memberikan variasi dalam metode pengajaran, seperti pembelajaran tematik, project-based learning, dan experiential learning, sehingga seluruh siswa, baik reguler maupun ABK, dapat terlibat aktif. Dalam praktiknya, suasana kelas

inklusif di sekolah ini berjalan harmonis; siswa reguler berinteraksi dengan ABK tanpa jarak sosial yang berarti.

Guru memanfaatkan berbagai alat bantu seperti gambar, media visual, dan permainan edukatif agar pembelajaran lebih mudah diakses oleh semua anak. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi siswa ABK, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruman et al. (2023) bahwa pembelajaran adaptif pada intinya adalah modifikasi aktivitas, metode, alat, atau lingkungan pembelajaran yang bertujuan untuk menyediakan peluang kepada anak dengan kebutuhan khusus mengikuti program pembelajaran dengan tepat, efektif serta mencapai kepuasan.

Dari aspek sumber daya manusia, sekolah menghadapi tantangan karena sebagian besar guru masih berlatar belakang pendidikan umum. Namun, kepala sekolah berinisiatif menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk menghadirkan mahasiswa Pendidikan Khusus (PKH) sebagai mitra pendamping. Sekolah juga mengadakan pelatihan internal untuk memperkuat pemahaman guru terhadap kebutuhan individual siswa.

Guru Pembimbing Khusus (GPK) memiliki peran sentral dalam pendampingan akademik dan sosial anak-anak berkebutuhan khusus. GPK membantu guru reguler dalam menyusun PPI, melakukan asesmen berkala, serta memfasilitasi komunikasi antara sekolah dan orang tua. Walaupun jumlah GPK masih terbatas, kerja kolaboratif antarguru telah membentuk sistem kerja yang solid dan adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Melati et al. (2024) bahwa Kompetensi pedagogik guru menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengelola keberagaman siswa. Memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus, dan merancang pembelajaran yang sesuai.

#### ***Fasilitas, Peran Orang Tua, dan Masyarakat***

Dari aspek fasilitas, sekolah telah berupaya menyediakan sarana penunjang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus dan adanya partisipasi dari orang tua meskipun masih terdapat keterbatasan. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang sumber (resource room), serta media pembelajaran adaptif seperti kartu bergambar dan alat peraga visual. Ruang sumber dimanfaatkan untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa yang membutuhkan pendampingan khusus, termasuk pengelolaan perilaku dan pelatihan kemandirian.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki toilet khusus bagi ABK serta masih membutuhkan alat bantu pembelajaran tambahan. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Putri & Mus (2021) yang menemukan bahwa fasilitas fisik di sekolah inklusi pada umumnya belum sepenuhnya ramah bagi semua jenis disabilitas. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penyediaan ruang sumber sebagai pusat layanan belajar adaptif. Demikian pula, Sudiarni, B and Idawati (2023) menyoroti bahwa keterbatasan sarana fisik menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dukungan orang tua dalam penyediaan alat bantu sederhana juga sejalan dengan hasil temuan (Rahmawati, 2024)

Keterbatasan fasilitas tersebut diatasi dengan kreativitas guru dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, serta masyarakat. Misalnya, guru menggunakan media pembelajaran berbasis gambar dan alat peraga sederhana yang mudah diakses anak-anak. Sekolah juga bekerja sama dengan pihak luar seperti mahasiswa Pendidikan Khusus dan lembaga sosial untuk menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan terapi.

Selain fasilitas, dukungan dari orang tua dan masyarakat menjadi pilar penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Orang tua ABK di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 terlibat aktif dalam proses belajar anak melalui komunikasi intensif dengan guru dan partisipasi dalam rapat perkembangan. Mereka turut berperan dalam menyusun dan mengevaluasi Program Pembelajaran Individual (PPI) serta menyediakan alat bantu yang diperlukan di rumah.

Sekolah juga menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye penerimaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat dukungan sosial terhadap siswa ABK, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya empati dan toleransi di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Tamsiyati et al. (2025) bahwa Kolaborasi yang erat antara guru, staf sekolah, dan orang tua merupakan komponen penting dalam pendidikan inklusif karena melibatkan mereka sebagai mitra dalam proses pendidikan anak-anak mereka, serta membantu mengembangkan rencana pendidikan yang sesuai dan memantau perkembangan anak

Dengan demikian, keterbatasan fasilitas fisik dapat diimbangi oleh kekuatan hubungan sosial dan dukungan emosional yang kuat dari berbagai pihak. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pendidikan

inklusif tidak hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Melalui kerja sama yang efektif, potensi anak akan berkembang secara optimal, baik dari segi akademik, emosional, maupun sosial.

### **Evaluasi dan Tantangan**

Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Guru melakukan evaluasi formatif setiap bulan untuk menilai perkembangan akademik, perilaku, dan keterampilan sosial siswa, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Evaluasi ini tidak berorientasi pada hasil semata, tetapi lebih menekankan pada proses dan kemajuan individual sesuai PPI.

Kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk meninjau hasil evaluasi dan membahas langkah-langkah perbaikan. Evaluasi program juga dilakukan pada akhir semester untuk mengukur efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Julinda Siregar et al. (2025) yang menegaskan bahwa Kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping sangat penting untuk keberhasilan pendidikan inklusif.

Namun, dalam proses pelaksanaan masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jumlah guru pembimbing khusus, sarana fisik yang belum sepenuhnya ramah difabel, serta pandangan sebagian masyarakat yang masih memandang anak berkebutuhan khusus sebagai kelompok terpisah. Potensi diskriminasi dan bullying juga menjadi perhatian penting yang terus diantisipasi pihak sekolah.

Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah menerapkan strategi penguatan karakter melalui kegiatan pembiasaan, pendidikan moral, dan class meeting bertema empati sosial. Dalam Kurniati & Ramadhan (2025) menyebutkan bahwa Pendidikan karakter adalah proses yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif pada individu, terutama siswa. Langkah kepala sekolah yang menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menambah tenaga pendamping dan memperbaiki sarana prasarana menunjukkan adanya pola kerja yang adaptif dan sistem perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar telah mencerminkan prinsip inklusivitas sejati: memberikan akses yang setara, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu, serta menumbuhkan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Sekolah telah membangun budaya yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan, dan berpotensi menjadi model sekolah dasar inklusif yang inspiratif di Kota Makassar.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini telah berjalan dengan cukup baik dan mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan setara bagi semua peserta didik. Sekolah telah melaksanakan kebijakan inklusif secara terbuka, menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi, serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan individual setiap anak melalui penerapan Program Pembelajaran Individual (PPI).

Selain itu, dukungan dari guru, kepala sekolah, dan orang tua menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah terhadap keberagaman. Guru dan tenaga pendidik telah berupaya menerapkan metode pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif agar setiap siswa, baik reguler maupun berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam suasana yang kondusif dan saling menghargai. Fasilitas sekolah juga mulai diarahkan untuk mendukung mobilitas dan kenyamanan peserta didik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan seperti kurangnya sarana fisik dan tenaga guru pembimbing khusus (GPK).

Upaya evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan inklusif. Tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan pandangan masyarakat yang masih beragam terhadap anak berkebutuhan khusus, diatasi melalui kerja sama lintas pihak dan pembiasaan karakter inklusif di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar telah berjalan selaras dengan kebijakan nasional pendidikan inklusif. Sekolah ini dapat

menjadi contoh penerapan praktik baik pendidikan dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, empati, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada UPT SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi I Makassar atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan observasi dan wawancara sebagai bagian dari proses penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, guru kelas, serta Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, dan mendukung kelancaran pengumpulan data.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah yang telah membimbing dalam penyusunan artikel ini, serta seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian dan penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

### REFERENSI

- Al-Nur, W. R. (2023). Strategi Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Inklusi di School of Human Jatisampurna Bekasi. *Mozaic: Islam Nusantara*, 9(1), 29–43.
- Arif, A., Al-faiz, M. A., Ramadhani, R. N., Hafizhah, U. H., & Mustika, D. (2025). Hambatan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(3), 1371–1376.
- Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y. (2023). Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(1), 198–208.
- Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. [https://www.tiraswati.net/download/file/PPP\\_INKLUSIF\\_PSP.pdf](https://www.tiraswati.net/download/file/PPP_INKLUSIF_PSP.pdf)
- Irmawati, I., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 168–184.
- Jannah, F., & Suriansyah, A. (2025). Membangun Karakter Siswa Melalui Kepemimpinan Inklusif Di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 150–158.
- Julinda Siregar, Novita Trianah, Ceni Liswati, & Saptiawati Saptiawati. (2025). Strategi Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah: Studi Kasus di SMP Negeri 4 Babelan. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 3(6), 277–290. <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i6.2292>
- Khoiruman, Azka Fikriyy, W., & Shohifur Rizal, Moh. A. (2023). Desain Kurikulum Pendidikan Berbasis Inklusi Adaptif Merdeka. *Gahwa*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.61815/gahwa.v2i1.301>
- Kurniati, E., & Ramadhan, S. (2025). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Penerapan Budaya Positif Sekolah Di Mi Nurul Ilmi Kota Bima. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 266–282.
- Melati, H. P., Setiasih, O., & Zaman, B. (2024). Kompetensi Pedagogik Guru PAUD Inklusi: Sebuah Analisis Literatur dan Implikasinya.
- Mujiati, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 1108–1116.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Putri, A., & Mus, S. (2021). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Unggulan. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 2(2), 191. <https://doi.org/10.26858/jak2p.v2i2.13474>
- Rahmawati, R. (2024). The Implementation Of Inclusive Education Policy At The Elementary School Level. 9(1).
- Sudiarni, S., B, R., & Idawati, I. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Pada Sekolah Inklusi Di SD Negeri Unggulan Mongisidi 1 Makassar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(4), 1484. <https://doi.org/10.35931/am.v6i4.1344>
- Tamsiyati, E., Kurnia, R., Amilda, A., & Junaidah, J. (2025). Kesiapan guru menyongsong era 5.0. *Indonesian Journal Of Education*, 1(3), 63–67.

Zahirah, A. H., & Maharani, D. A. (2025). Pendidikan Untuk Semua: Praktik Inklusi Dan Peran Guru Dalam Mengajar Siswa Dengan Kebutuhan Khusus. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 221–235.